



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADE TRI AJIKUSUMAH
2. Jabatan : INSPEKTUR
3. NHK : 245411

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 2.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 345 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA BENGKULU , HIBAH TANPA AKTA Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1425 m2/24 m2 di KAB / KOTA BENGKULU TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/120 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 372.000.000

1. MOBIL, HYUNDAI TUCSON2.02WDAT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOBIL, KIA NEW RIO MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
4. MOTOR, HONDA F1C02N28L0AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 S CVT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 281.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 443.989.478



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.596.989.478
III. HUTANG	Rp.	152.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.444.489.478

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.